

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN
2008 PASAL 3 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA
DESA DI DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
(SUATU PENDEKATAN FIQH SIYASAH)**

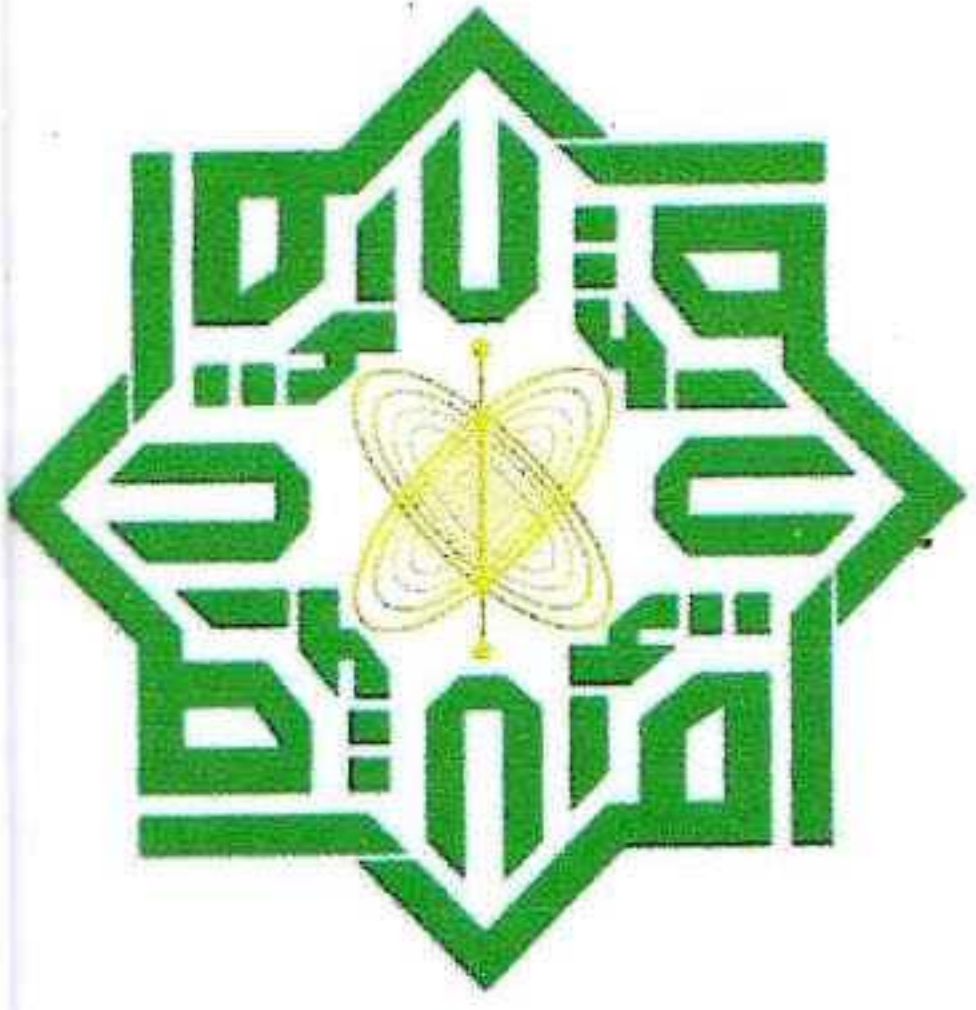
SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Syari'ah (S. Sy)



SYAMSUNI
11024104136

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2014 M/ 1434 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Alamat : Jl. H.R. Soebrantas KM. 15 Tampan Pekanbaru – Riau No. TELP. 0761-561645
Fax. 0761-562052, Web. www.uin suska.ac.id, E-mail : rektorat @

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 PASAL 3 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DI DESA PULAU SENGILO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU (SUATU PENDEKATAN FIQIH SIYASAH)** yang ditulis oleh:

Nama : SYAMSUNI

NIM : 11024104136

Jurusan : JINAYAH SIYASAH

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Sarjana Program S1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Mei 2014 M

Bertepatan : 23 Rajab 1435 H

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

Pekanbaru, 08 September 2014

Dekan




Dr. H. Akbarizan, M. Ag, M.Pd

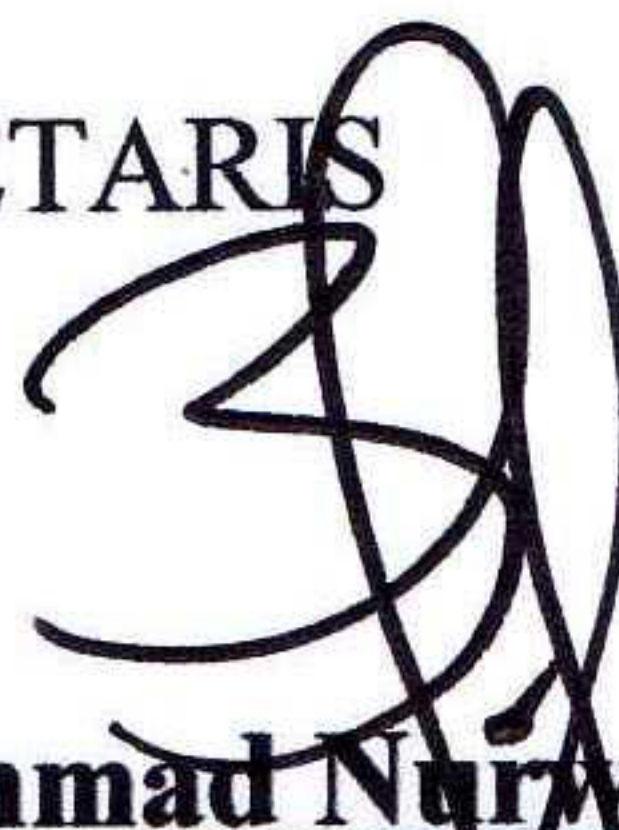
Nip. 19711001 199503 1 002

PANITIA UJIAN SARJANA

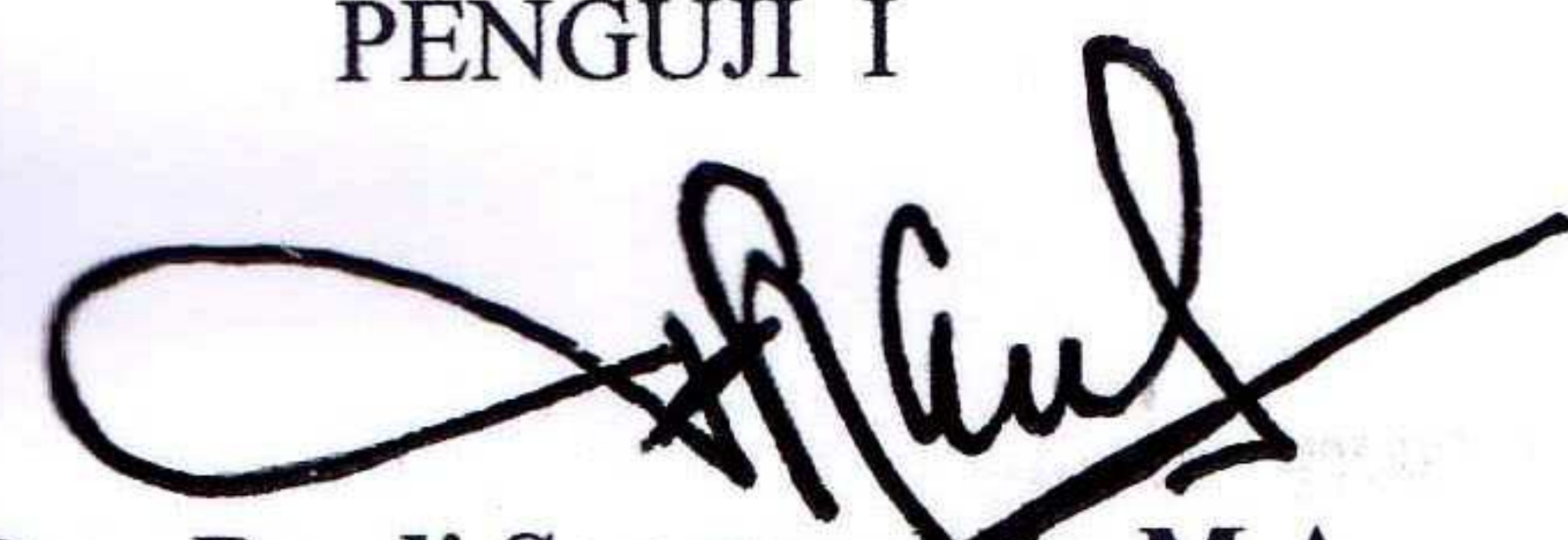
KETUA


Drs. Ahmad Darbi B. M. Ag
Nip. 19530308 1 198303 1 003

SEKRETARIS


Muhammad Nurwahid, M. Ag
Nip. 19710101 200003 1 002

PENGUJI I


Drs. Pardi Syamsudin, M. A
Nip. 19511111 198003 1 003

PENGUJI II


Dra. Sophia Hardani, M. Ag
Nip. 19630530 199303 2 001

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Tugas dan Wewenang Kepala Desa di Desa Pulau sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu (Suatu Pendekatan Fiqh Siyasah)**. Latar belakang pemilihan judul ini yaitu adanya Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2008 Pasal 3 Kabupaten Indragiri Hulu yang terlihat tidak dilaksanakan di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang kabupaten Indragiri Hulu. Masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana tugas dan wewenang kepala desa menurut Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2008 Pasal 3, bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Pasal 3 di desa Pulau Sengkilo, apa kendala kepala desa dalam melaksanakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Pasal 3 di desa Pulau sengkilo, serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Tugas dan Wewenang Kepala Desa.

Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah sepuluh (10) orang, yang terdiri dari satu orang Kepala Desa dan sembilan orang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di desa Pulau Sengkilo. Dikarenakan jumlah populasi sedikit, maka seluruhnya dijadikan sampel (*Total Sampling*). Data primer diperoleh dari Kepala Desa dan anggota BPD, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi, arsip serta buku-buku yang terkait yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi serta tinjauan pustaka.

Hasil penelitian ini diketahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Tugas dan Wewenang Kepala Desa di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu secara umum kurang baik, dikarenakan anggota BPD desa Pulau Sengkilo belum dapat melaksanakan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Tugas dan Wewenang Kepala Desa di Desa Pulau Sengkilo, hal ini dapat dilihat dari aspek ketidakeaktifan anggota BPD, karena tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Adapun faktor kendalanya adalah kurangnya pengetahuan Kepala Desa dan anggota BPD tentang Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2008 ini, rendahnya latar belakang pendidikan Kepala Desa dan anggota BPD desa Pulau Sengkilo, kurangnya kerja sama antara kepala desa dengan anggota BPD, serta rendahnya penghasilan kepala Desa dan anggota BPD sehingga dapat membuat kepala Desa dan anggota BPD tidak bisa bekerja secara maksimal dalam menjalankan pemerintahan desa.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Tugas dan Wewenang Kepala Desa di Desa Pulau Sengkilo ini belum berjalan diatas prinsip kemashlahatan umat seperti yang tertuang dalam Fiqh Siyasah Islam. Konsep dasar kepemimpinan yang tertuang dalam Fiqh siyasah yaitu amanah, berlaku adil tanpa membedakan antara satu dengan yang lain, kebebasan berfikir sesuai syariah, serta menghidupkan prinsip bermusyawarah. Hal ini tidak diterapkan di dalam kepemimpinan kepala desa di Desa Pulau sengkilo.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. *Robbu al-Alamin* atas segala limpahan rahmat, hidayah dan 'inayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 3 Tentang Tugas dan Wewenang Kepala Desa di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu (Suatu Pendekatan Fiqh Siyasa)"** ini dengan baik tanpa banyak kendala yang berarti. Shalawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang telah membawa Islam dan mengembangkannya hingga sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis secara pribadi. Tetapi semua itu merupakan wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan serta do'a dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu, penulis sampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga, atas segala do'a, perhatian dan curahan kasih sayang yang tiada tara dan tak terbalaskan, yaitu ayahanda H. Muslim dan ibunda Hj. Khadijah
2. Prof. Dr. H.M. Nazir, MA, selaku Rektor UIN Suska Riau.
3. Dr. H. Akbarizan M.A, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

4. Ibu Dr. Hj. Hertina, M.Pd, selaku Wakil Dekan I, Bapak Muhammad Kastulani, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II dan Bapak Drs. H. Ahmad Darbi, M.A, selaku Wakil Dekan III di Fakultas Syari`ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Ismardi Ilyas, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari`ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
6. Bapak Kamiruddin M.Ag, selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motifasi, saran dan koreksi serta telah mengorbankan waktunya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta para jajarannya akademika Fakultas Syari`ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
8. Seluruh keluarga besar tercinta yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis.
9. Seluruh sahabat-sahabatku seperjuangan, khususnya di Jurusan Jinayah Siyasah dan di UIN Suska Riau pada umumnya.
10. Keluarga besar Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2010 UIN Suska Riau.
11. Bapak Sulaiman beserta keluarga (Paman Penulis) yang telah banyak membantu penulis baik dari segi materil maupun non materil terhadap penulis.
12. Semua pihak yang membantu demi terwujudnya skripsi ini, khususnya para sahabatku yang banyak memberikan dorongan moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada kata lain yang dapat penulis haturkan selain ungkapan terima kasih dan doa semoga Allah Yang Maha Mengetahui membalas setiap kebaikan yang telah diperbuat kepada penulis.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semua itu karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Amin.

Pekanbaru, 20 April 2014

Penulis,

Syamsuni

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II : GAMBARAN UMUM DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU	14
A. Keadaan Umum.....	14
B. Keadaan Geografis	14
C. Keadaan Demografi	15
D. Pemerintahan Desa.....	19
E. Badan Permusyawaratan Desa Pulau Sengkilo.....	21
F. Sarana Transportsi dan Komunikasi	23
BAB III : TUGAS DAN WEWENANG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH	
A. Pengertian Tugas dan Wewenang	24
B. Macam-Macam Tugas dan Wewenang.....	28
C. Pertanggung jawaban	35
D. Ahl Al Hall Wa Al-‘Aqd.....	38

**BAB IV : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 2 TAHUN 2008
PASAL 3 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA
DESA DI DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN
KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

- A. Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Peraturan Daerah
No. 2 Tahun 2008 Pasal 3 di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan
Kelayang kabipaten Indragiri Hulu42
- B. Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Pasal 3 di
Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang kabupaten Indragiri
Hulu46
- C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kepala Desa dalam
Menjalankan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Pasal 3
tentang Tugas dan Wewenang Kepala Desa Kabupaten
Indragiri Hulu51
- D. Perspektif Fiqh Siyasah57

BAB V : PENUTUP67

- A. Kesimpulan67
- B. Saran68

DAFTAR PUSTAKA70

LAMPIRAN-LAMPIRAN